

Indonesia's Free and Active Foreign Policy is the Basis for Realizing World Peace

Susilawati^{1*}, Rizal Yusuf², Arief Rachman³
Program Doktor, Universitas Pertahanan, Indonesia
Corresponding Author: sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Politics, Active Freedom, World Peace

Received : 09 February

Revised : 25 February

Accepted: 27 March

©2024 Susilawati, Rachman:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The key to world peace is living peacefully side by side between fellow countries in the world and not disturbing each other. The character of the Indonesian nation is the potential to become superior diplomats in various fields of life and can influence the world to live life in a spirit of humanity and nobility regardless of culture, ethnicity, religion, nation, race and status in order to realize world peace. This spirit will enable Indonesia's free and active foreign policy to be implemented effectively and provide positive results and benefits for the Indonesian nation and other peoples in the world.

Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif Dasar Mewujudkan Perdamaian Dunia

Susilawati^{1*}, Rizal Yusuf², Arief Rachman³

Program Doktorat, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Politik, Bebas Aktif, Perdamaian Dunia

Received : 09 Februari

Revised : 25 Februari

Accepted: 27 Maret

©2024 Susilawati, Rachman:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kunci perdamaian dunia adalah hidup tenang berdampingan antar sesama negara di dunia dan tidak saling mengganggu. Karakter bangsa Indonesia merupakan potensi untuk menjadi diplomat unggul di berbagai bidang kehidupan serta dapat memberi pengaruh kepada dunia untuk menjalankan kehidupan dalam semangat kemanusiaan dan kemuliaan apapun budaya, suku, agama, bangsa, ras dan statusnya dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Semangat ini akan membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat efektif dijalankan serta memberi hasil dan manfaat positif bagi bangsa Indonesia serta masyarakat bangsa lainnya di dunia.

PENDAHULUAN

Jelas tertulis pada Pembukaan UUD 1945, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” yang berarti bangsa Indonesia berprinsip dan menekankan kehidupan yang lebih damai bagi seluruh warga masyarakat di dunia, yang merupakan bagian dari bangsa di dunia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang berbunyi “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan”. Indonesia dengan negara-negara lain di dunia merupakan masyarakat global dan saling ketergantungan satu dengan yang lain serta adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetensi pada akhirnya berebut pengaruh antar bangsa baik di tataran regional maupun global. Hal ini sulit dihindari karena pada dasarnya sebagai individu, negarapun tidak dapat hidup sendiri karena sangat memerlukan komponen lainnya dari berbagai negara lain di dunia bahkan ada pula negara yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sangat erat dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan militer. (Attaulloh et al., 2022). Perdamaian menjadi kesepakatan Bersama untuk diwujudkan oleh seluruh negara di dunia dengan mengusung semangat hidup yang didasarkan pada rasa kemanusiaan sebagai entitas yang sama di muka bumi. Setiap individu dilindungi dan disejahterakan kehidupannya agar memiliki kualitas hidup yang sama baiknya dengan masyarakat di negara lainnya.

Keseimbangan ini sangat dibutuhkan bagi terwujudnya perdamaian dunia untuk menghindari terjadinya ketegangan akibat perbedaan sikap dan ego dari para pemimpin dunia. Harus ditanamkan konsep perdamaian yang kuat bagi pemimpin-pemimpin dunia bahwa sudah saatnya kehidupan manusia di muka bumi menjadi tanggung jawab bersama untuk dipelihara dengan baik, untuk apa modernitas kemajuan teknologi terus maju dan berkembang jika justru sebagai pemicu ketegangan dan memunculkan konflik akhirnya terjadi peperangan yang mengakibatkan nyawa manusia terenggut. Sejatinya kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia itu sendiri agar kualitas hidup meningkat lebih baik dan jauh dari kesulitan. Hal ini harus menjadi konsep dan pedoman serta perhatian tinggi bagi dunia karena melindungi rasa kemanusiaan adalah pencapaian paling mulia bagi umat manusia. Bagaimana dalam mengupayakan agar dapat menghindari terjadinya perang, dengan melihat ketegangan di Laut China Selatan (LCS) saat ini yang semakin mengkhawatirkan, terjadinya perang Rusia-Ukraina akibat perbedaan pandang padahal kedua negara berasal dari kultur yang sama, perang Israel-dengan kelompok bersenjata Hamas di Palestina yang terus berlangsung, perang saudara di Yaman yang telah menewaskan banyak manusia serta membuat penderitaan bagi manusia dari bangsa tersebut dan lain-lain. Untuk itu dengan semangat kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang dimiliki Indonesia dengan tidak beraliansi dengan negara manapun, yang mengukuhkan bahwa seluruh negara di dunia adalah sahabat maka Indonesia dapat mengupayakan jalan kebaikan bagi terwujudnya keamanan

global. Seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak (Susilo Bambang Yudhoyono).

Ketegangan yang terus terjadi di antara negara-negara super power seperti Amerika, Rusia dan China dan negara-negara yang beraliansi terus berkompetisi untuk menjadi negara yang terkuat di dunia dan ingin mengendalikan kehidupan dunia yang berdampak terjadinya ketegangan-ketegangan di dunia khususnya bagi negara yang menjadi sekutu dari negara-negara super power tersebut. Hegemoni mereka dengan memperebutkan pengaruh besar dan dukungan yang dibutuhkan akan sulit menghindari terjadinya perang dunia ke-3. Keadaan ini tentu akan berdampak pula pada negara lainnya yang tidak berafiliasi pada negara manapun, padahal sejauh ini semangat yang sedang dibangun ditujukan pada upaya untuk menata dan mengelola negaranya masing-masing dengan begitu kerasnya agar kesejahteraan dan stabilitas negara terwujud. Perang menurut KBBI adalah pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih, yang bertujuan untuk menghancurkan lawan hingga titik terlemah. Peperangan itu mahal dan melelahkan serta menakutkan karena membuat rasa sakit dan derita bagi mereka yang berperang. Serta tidak mudah bangkit dari keterpurukan akibat perang karena ego para pemimpin yang tidak dapat dikendalikan akhirnya manusia yang tidak berdosa menjadi sasaran dan korban perang. Di era modern sekarang Dimana teknologi berkembang sangat canggih sejatinya kehidupan manusia semakin berkualitas tinggi dengan dasar kemanusiaan, jauh dari unsur kekerasan dan paksaan karena hak azasi setiap manusia terlindungi.

TINJAUAN PUSTAKA

Awal mula studi Hubungan Internasional (HI) ditelusuri ke belakang di masa pra-modern, kajian-kajian ini dimasukkan dalam kategori studi HI yang berada pada lingkup ilmu strategi militer. Karya sejarawan Yunani kuno, Thucydides (460 BC - 400 BC), *The History of the Peloponnesia War*, dan karya Sun Tzu, *The Art of War* (512 BC) adalah contoh klasik dari kajian studi HI di jaman pra-modern. Dalam perkembangannya studi HI mengalami perkembangan yang pesat terutama di benua eropa pada masa pasca Perjanjian Westphalia 1648 yang memutuskan pemisahan gereja (agama) dari politik dan memberikan hak bagi negara-bangsa (nation-state) untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu. Namun di negara sal studi HI yaitu Britania Raya hingga pada tahun 1900 kajian mengenai hubungan antar negara berdaulat menjadi sub kajian dari ilmu-ilmu sosial yang lebih tua yaitu ilmu hukum dan ilmu filsafat (Munafrizal Manan, n.d.).

Persoalan besar teoritis dan akademis dalam disiplin Ilmu hubungan Internasional (HI) yang masih terus mengemuka hingga saat ini tentang ketidaksepakatan para ilmuwan HI terhadap pertanyaan mengenai apakah masih relevan paradigma realisme digunakan dalam memahami masalah internasional yang muncul setelah perang dunia berakhir? Dalam artikel yang berjudul "No Exit: The Errors of Endism," Samuel Huntington (*The National Interest*, 1989) mengatakan bahwa di era akhir perang dingin (1989) disiplin HI mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Di masa perang dingin paradigma deklinisme sangat mendominasi dan masa setelahnya,

paradigma endisme justru semakin berperan. Di era sekarang menurut pemahaman paradigma endisme hal yang menjadi masalah internasional sudah berakhir dan bahwa realisme tidak lagi dipandang sebagai paradigma yang paling presisi. Endisme menyatakan dalam proposisi yang lebih akademik dan umum bahwa perang di antara negara-negara bangsa telah berakhir. Semakin banyak ilmuwan HI berpandangan mengenai gagasan bahwa tidak ada perang di antara negara-negara demokratis. Dalam Sejarah semakin meningkatnya rezim demokratis sejak tahun 1974 adalah bukti bahwa kemungkinan terjadinya perang sangat kecil (Asrudin, 2017).

Dalam sebuah artikel adanya bantahan dan gugatan Peter Van Ness terhadap paradigma realisme, merujuk karya Thomas Kuhn tentang pergeseran paradigma, Van Ness berargumen bahwa realisme yang disebut oleh Thomas Kuhn sebagai "normal science" dalam teori hubungan internasional dan berada dalam Krisis karena ketidakmampuannya untuk menjelaskan sejumlah anomali kehidupan. Menurut Van Ness dengan semakin maraknya Kerjasama keamanan yang terjadi antar negara cukup untuk menyebutkan bahwa realisme berada dalam tahap krisis sebagai sebuah paradigma dan artikel tersebut berpendapat bahwa realisme tetaplah relevan dan layak disebut sebagai paradigma dalam kategori Kuhnian (Djatah, 2021).

Kegagalan paradigma idealis untuk menjelaskan tentang fakta hubungan Internasional pada dekade 1930-an mendapat respon yang melahirkan paradigma alternatif yang dikenal sebagai paradigma realisme. Paradigma realisme yang muncul pada era pasca PD II (1940-an) secara umum adalah sebuah paradigma yang dominankarena dominasinya berlangsung hingga decade 1980-an. Kemunculan paradigma realisme tidak terlepas dari tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di era pasca PD II, ada kecenderungan pemerintah Amerika Serikat mendorong diperkuatnya kajian hubungan internasional untuk memetakan Tindakan negara adi day aini di masa depan. Ada tiga prinsip yang ditawarkan oleh paradigma realisme: Pertama, bahwa negara adalah actor terpenting dalam hubungan internasional. Kedua, terdapat perbedaan yang tajam antara politik dalam negeri dan politik internasional. Ketiga, titik tekan kajian hubungan internasional adalah mengenai kekuatan dan perdamaian. Karya yang dinilai sangat fundamental dalam membangun paradigma realis ini adalah *Politics Among Nations* oleh Morgenthau dan *The twenty Years Crisis* oleh E.H. Carr (Hidayat, 2018).

Argument dasar dari realisme yang diringkas oleh Robert Gilpin bahwa sifat konfliktual dalam urusan internasional dan esensi dari realitas sosial adalah kelompok di mana sumber daya yang langka dan konflik mengenai distribusi sumber daya tersebut menjadikan umat manusia saling berhadapan satu dengan lainnya yang pada akhirnya sebagai sebuah kelompok dan bukan lagi sebagai individu yang terisolasi. Homo sapiens berada di atas semua kesetiaan selain terhadap keluarga. Di dunia modern, kita telah memberi nama negara-bangsa kepada suku-suku dan suku-suku yang saling bersaing ini disebut nasionalisme sebagai bentuk kesetiaan. Benar bahwa nama, ukuran dan organisasi kelompok-kelompok yang bersaing di mana spesies kita terbagi-bagi akan berubah seiring berjalannya waktu, suku, negara kota, Kerajaan, kekaisaran dan negara-bangsa

terhadap perubahan ekonomi, geografi dan teknologi. Disayangkan sifat esensial dari konflik antar kelompok tidak demikian, dan yang menjadi ciri pemikiran realis adalah keutamaan dalam kehidupan politik kekuasaan dan keamanan dalam motivasi manusia (Davenport, 2011, hal. 36).(Alvian, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif, dengan dasar ini sejatinya mampu mempengaruhi negara-negara di dunia untuk dapat mengendalikan diri dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak azasi Manusia. Apalagi didukung dengan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, yang berarti kesetaraan pada rasa kemanusiaan dengan mengedepankan rasa keadilan, dilindungi serta dijauhkan dari tindakan kekerasan dan pemaksaan oleh pihak lain. Dengan menguatkan kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia, saling menguntungkan dan berorientasi pada kesejahteraan hidup dengan cara saling mengisi, melengkapi, mendukung dan menguatkan tapi bukan sebaliknya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran terdepan dan terkuat dalam mewujudkan perdamaian dunia atas pertikaian yang terjadi antar negara di dunia. Sejak berakhirnya perang dunia kedua seluruh dan organisasi internasional telah menyepakati pentingnya operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik dengan proyek peacemaking. Peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan cara meminimalisir kekerasan dan ancaman yang terjadi (Attaulloh et al., 2022).

Perkembangan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tidak semata dipengaruhi oleh situasi domestik tetapi juga oleh pertumbuhan iklim politik internasional, perubahan yang cepat pada iklim politik internasional harus dapat diikuti dan dianalisis secara terus menerus agar kepentingan nasional Indonesia terjaga dan tercapai. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk menyikapi perubahan tersebut dan diputuskan dalam implementasi politik luar negeri yang bebas dan aktif (Santoso, 2023). Politik luar negeri yang bebas dan aktif menjadi peluang untuk mengajak negara di dunia bersatu atas dasar entitas yang sama sebagai manusia. Dengan begitu maka keamanan global dapat stabil sehingga lebih mudah dalam mencapai target-target mulia yang diinginkan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia melalui Gerakan Non Blok (GNB) muncul sebagai aksi penolakan dari negara yang Merdeka untuk tidak memilih antara dua kubu negara adidaya antara Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet yang terjadi ketika terjadinya perang dingin. Indonesia harus menjadi pelopor terbentuknya GNB yang menolak keras segala bentuk penjajahan di atas dunia dan menginginkan terciptanya perdamaian. Indonesia masih optimis serta aktif dalam gerakan ini karena masih relevan dengan kondisi saat ini dalam menghadapi permasalahan global yang terus semakin kompleks (Wijayanti, 2022).

Karakter Bangsa Indonesia yang mengedepankan sikap spiritual dan ketenangan hati sejatinya mampu menularkan keheningan pada dunia. Dengan spirit ini juga Indonesia tidak terbebani dalam menyiapkan anggaran kekuatan militer yang harganya tidak murah karena pertahanan negara terdiri dari

kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter serta saling mendukung. Kekuatan militer sebagai komponen utama dalam situasi perang militer dan kekuatan nirmiliter adalah komponen utama dalam situasi damai dalam menjaga negara, hal ini disebut sebagai pertahanan semesta. System pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi. Semesta menunjukkan upaya mempertahankan negara dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya (Pasal 1 Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). Pada konsep keamanan nasional, "kaum liberalis focus pada niat negara sebagai factor utama yang mempengaruhi keamanan internasional, kaum liberal sangat percaya pada efek independent dari niat bahwa jika ada niat yang baik, negara akan mengembangkan kemampuan ofensif. Kaum liberal percaya pada kemungkinan peningkatan perdamaian dan keamanan melalui demokratisasi". Eranya sudah berubah, tidak lagi berfokus pada upaya penghancuran tetapi pada pembangunan manusia yang lebih adil dan bermartabat sebagai makhluk yang berpikir dan berakal dengan diplomasi yang kuat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kaum realis skeptis bahwa negara bisa saja menghadapi ancaman dalam jangka waktu lama selama sistem internasional bersifat anarkis yaitu ketika negara harus menjaga keamanannya sendiri. Karena ancaman kekerasan ekaternal pada tingkat tertentu dapat terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Kunci keamanan negara terletak pada kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman tersebut.

Kaum liberal fokus pada niat negara sebagai faktor utama yang mempengaruhi keamanan internasional. Kaum liberal sangat percaya pada efek independen dari niat bahwa jika ada niat yang baik, negara akan mengembangkan keamanan ofensif. Kaum liberal percaya pada kemungkinan peningkatan perdamaian dan keamanan melalui demokratisasi, ekonomi dan aliansi.

Pentingnya mewujudkan perdamaian dunia dengan memunculkan kesadaran tinggi bagi pemimpin dunia dengan mengedepankan keadilan dan rasa kemanusiaan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Indonesia mampu menjaga dan menghormati perbedaan negara-negara di dunia dengan menyerukan untuk apa manusia dilahirkan ke dunia jika kemudian hanya untuk merasakan ketakutan dan kecemasan akan keselamatan diri. Dengan semangat menghentikan memproduksi senjata secara massal maka perang dunia ketiga yang terjadi ditujukan pada perang untuk memerangi ego para pemimpin dunia. Indonesia dapat mengambil posisi sebagai oposisi terhadap negara-negara dunia yang bersekutu, harapannya keseimbangan hidup manusia untuk mewujudkan perdamaian dapat terwujud. Indonesia yang tidak beraliansi dengan negara manapun di dunia yang berarti semua negara adalah sahabat sejatinya dapat memengaruhi dunia untuk mengedepankan rasa kemanusiaan di atas segalanya.

Apa tujuan jumlah manusia di muka bumi tidak dibatasi jika hanya untuk dijadikan korban perang akibat ulah manusia itu sendiri. Sejatinya jika tidak mampu untuk menyiapkan daya tampung dan daya dukung bagi jumlah manusia yang terus bertambah maka dapat dibuat kebijakan untuk membatasi kelahiran manusia di bumi agar tercipta kehidupan yang layak bagi seluruh umat manusia. Kehidupan hari ini yang dicapai dengan perjuangan berat dari generasi ke generasi sejatinya tidak ditarik ke belakang kembali ke titik nol dan harus menghadapi situasi perang seperti jaman dahulu saat ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang. Harapannya semoga karakter bangsa Indonesia menjadi diplomat unggul di berbagai bidang kehidupan dan dapat memengaruhi dunia untuk hidup dalam semangat kemanusiaan dan kemuliaan apapun budaya, suku, agama, bangsa, ras dan statusnya. Dengan semangat ini maka kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat efektif dijalankan dan memberi hasil dan manfaat positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia juga masyarakat bangsa lainnya di dunia. Hidup tenang berdampingan antar sesame negara di dunia dan tidak saling mengganggu adalah kunci perdamaian.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri mengkampanyekan perlindungan terhadap negara-negara di dunia untuk saling menjaga dan menghormati perbedaan masing-masing negara agar terwujud kehidupan yang ramah terhadap kemanusiaan karena nilai kemanusiaan di atas segalanya

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari bahwa, karena pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dari peneliti sendiri, ada banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, terutama dalam hal bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membuat artikel lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alvian, R. A. (2016). Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.7454/global.v18i1.47>

Asrudin, A. (2017). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28830>

Djatah, S. (2021). Dari Anarki Ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 170–193. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.796>

Hidayat, N. (2018). Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 15. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1271>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Munafrizal Manan. (n.d.). 1315-Article Text-2765-1-10-20150120. 179–194. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasi/ona/article/download/1315/1278/2765> Attaulloh, I. fajar, Wibisono, G., Febiansyah, & Santoso, G. (2022). Pemersatu Antar Negara; Perdamaian Dunia Yang Diimpikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 01(03), 16–29.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Santoso, G. (2023). Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Untuk Perdamaian Dunia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2 (politik luar negri), 354–359.

UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology : Journal of Government Studies*, 2(2), 70-95.